

PERAN TEKNOLOGI DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Farida Hanum.D,
hanumdfarida2106@gmail.com
Poltekkes Kemenkes Riau

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan dalam teknologi dan informasi yang modern, pemerintah memanfaatkan hal tersebut untuk mengurangi tingkat korupsi dan menginformasikan bahwa praktik korupsi dalam berbagai sektor mengalami penurunan berkat pemanfaatan teknologi. Contohnya, teknologi dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Fungsi teknologi dinilai sangat krusial untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan bagi masyarakat. Dalam usaha pemberantasan korupsi terkandung upaya penindakan dan pencegahan korupsi, serta ambang bagi partisipasi masyarakat yang seharusnya dapat semakin ditingkatkan melalui akses yang lebih baik terhadap informasi.

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan publik sebagai salah satu metode dalam pencegahan korupsi. Di sisi penindakan, (tanpa bermaksud mengabaikan pendapat yang bertentangan) undang-undang memberikan kesempatan bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan korupsi untuk mengakses dan memanfaatkan informasi elektronik demi memperkuat bukti dalam kasus korupsi. Saat ini, kita tengah menunggu kehadiran regulasi pemerintah yang akan lebih menata intersepsi dalam proses penegakan hukum, sejalan dengan mandat undang-undang.

Perkembangan teknologi, terutama dalam bidang sistem informasi dan komunikasi, membuka peluang untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan cara memanfaatkan penerapan teknologi tersebut. Dengan kata lain, aksi korupsi bisa dihindari melalui sarana elektronik. Penggunaan teknologi sistem informasi dan komunikasi diharapkan dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap penghapusan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui (e-government) yang bertujuan memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat, kegiatan bisnis, serta hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam tulisan ini akan dibahas: pertama, metode apa saja yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi; kedua, bagaimana teknologi informasi dimanfaatkan dalam usaha pencegahan tindak pidana korupsi secara elektronik.

2. PERNYATAAN OPINI / TESIS

Menurut saya, kemajuan teknologi digital menawarkan banyak kesempatan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan. Penggunaan teknologi seperti sistem pemerintahan digital, e-government, dan platform

pelaporan elektronik dapat menyederhanakan proses pengawasan terhadap pengelolaan dana publik dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, keterlibatan masyarakat sebagai pengawas sosial juga sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintahan dilaksanakan dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi antara kepemimpinan yang memiliki integritas, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terbebas dari korupsi.

3. ARGUMEN ILMIAH

3.1. Argumen Pertama

Salah satu faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi adalah kepemimpinan yang memiliki integritas dan komitmen kuat terhadap transparansi. Kepemimpinan yang efektif dapat memberikan arah yang jelas bagi organisasi maupun pemerintahan dalam menjalankan kebijakan antikorupsi. Seorang pemimpin yang visioner dan berintegritas tidak hanya berperan dalam membuat kebijakan, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai kejujuran dan akuntabilitas dalam organisasi.

Di era digitalisasi 5.0, tantangan korupsi menjadi semakin kompleks karena perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menyembunyikan aktivitasnya. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memanfaatkannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Penggunaan teknologi seperti analisis big data dan kecerdasan buatan dapat membantu pemimpin dalam mendeteksi pola-pola korupsi serta memperkuat sistem pengawasan.

Selain itu, kepemimpinan yang kolaboratif juga sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemimpin tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus mampu membangun kerja sama dengan berbagai pihak seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum. Kolaborasi tersebut memungkinkan adanya sinergi dalam memanfaatkan sumber daya, teknologi, serta pengetahuan untuk memperkuat sistem pencegahan dan penindakan korupsi secara lebih efektif. (Makalao and Z Soeratin 2023)

3.2. Argumen Kedua

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik. Teknologi dapat digunakan untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan sehingga proses pelayanan publik menjadi lebih terbuka dan mudah diawasi oleh masyarakat.

Salah satu bentuk penerapan teknologi dalam pemberantasan korupsi adalah penggunaan sistem **e-government** dan **e-procurement**. Sistem tersebut memungkinkan proses administrasi pemerintahan dilakukan secara digital sehingga dapat meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat. Dengan berkurangnya interaksi

langsung, peluang terjadinya praktik suap, pungutan liar, atau penyalahgunaan wewenang dapat ditekan secara signifikan.

Selain itu, teknologi juga memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara lebih efektif melalui sistem audit berbasis digital dan analisis data. Dengan menggunakan teknologi informasi, lembaga pengawas dapat mendeteksi adanya penyimpangan atau aktivitas mencurigakan secara lebih cepat dibandingkan dengan sistem pengawasan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di sektor public. (Evi Apriani, Prabu Kemal Manaf, and Vivi Riska Ramadani 2025)

3.3. Argumen Ketiga

Teknologi informasi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi dapat membantu pemerintah dalam menyediakan akses informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat serta memperbaiki sistem pelayanan publik.

Salah satu contoh penerapan teknologi dalam upaya pencegahan korupsi adalah sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sistem ini memungkinkan seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan melalui jaringan elektronik sehingga setiap tahapan dapat dipantau oleh berbagai pihak. Dengan adanya sistem tersebut, potensi manipulasi dalam proses pengadaan dapat diminimalkan karena seluruh data tercatat secara digital dan dapat diaudit dengan mudah.

Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam proses penegakan hukum melalui penggunaan bukti digital dalam penyelidikan kasus korupsi. Perkembangan teknologi digital memungkinkan penyidik untuk mengumpulkan dan menganalisis data elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berperan dalam pencegahan korupsi tetapi juga dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. (Rerung and Sobon 2021)

3.4. Argumen Keempat

Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah atau aparat penegak hukum saja, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting sebagai pengawas sosial yang dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Korupsi tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga merupakan masalah sosial yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan perilaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan kebijakan publik. Masyarakat dapat berperan dalam melaporkan indikasi korupsi, mengawasi kebijakan pemerintah, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran sebagai agen perubahan dalam membangun budaya antikorupsi. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial, diharapkan

masyarakat dapat berperan aktif dalam menolak berbagai bentuk praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari. (Steven Ferico, Elsa Putri Aryanti, and Maisya Hanifah Salsabila 2020)

3.5. Argumen Kelima

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Kepemimpinan yang berintegritas, pemanfaatan teknologi digital, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan tiga faktor penting yang saling berkaitan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pemimpin yang mampu memanfaatkan teknologi dan membangun kerja sama dengan masyarakat akan lebih efektif dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat terhadap praktik korupsi. Di sisi lain, masyarakat yang memiliki akses informasi yang luas melalui teknologi juga dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, teknologi, dan masyarakat, peluang terjadinya korupsi dapat diminimalkan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan bertanggung jawab. (Asyujuti et al. 2025)

4. DISKUSI / IMPLIKASI

Berdasarkan berbagai argumen yang telah dibahas, menurut saya pemberantasan korupsi tidak bisa dilihat sebagai upaya yang berdiri sendiri, melainkan sebagai proses yang saling berkaitan antara sistem, teknologi, dan perilaku manusia. Kepemimpinan yang berintegritas, pemanfaatan teknologi digital, serta partisipasi masyarakat bukanlah faktor yang terpisah, tetapi harus berjalan secara bersamaan agar dapat memberikan hasil yang optimal dalam menekan praktik korupsi.

Dari sisi kepemimpinan, implikasi yang dapat dilihat adalah pentingnya peran pemimpin dalam menentukan arah kebijakan antikorupsi. Pemimpin yang tidak memiliki komitmen terhadap transparansi akan sulit menciptakan sistem yang bersih, meskipun sudah didukung oleh teknologi yang canggih. Sebaliknya, pemimpin yang berintegritas dapat memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan (Makalao & Soeratin, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan antikorupsi sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan itu sendiri.

Dari sisi teknologi, implikasinya adalah perlunya pengembangan sistem digital yang tidak hanya canggih, tetapi juga mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat. Teknologi seperti e-government dan e-procurement terbukti mampu meningkatkan transparansi dalam proses administrasi dan pengadaan barang dan jasa (Apriliani et al., 2025). Namun, menurut saya, teknologi tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang baik. Tanpa pengawasan yang kuat, teknologi justru dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Sementara itu, dari sisi masyarakat, implikasinya adalah pentingnya meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pengawas yang

aktif terhadap penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan kebijakan publik. Seperti yang dijelaskan oleh Ferico et al. (2020), keterlibatan masyarakat dapat menjadi salah satu bentuk kontrol sosial yang efektif dalam mencegah praktik korupsi. Menurut saya, semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi, maka semakin kecil peluang bagi praktik tersebut untuk berkembang.

Selain itu, implikasi lain yang dapat dilihat adalah perlunya sinergi antara pemerintah, teknologi, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih. Ketika ketiga aspek ini dapat berjalan secara seimbang, maka transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika salah satu aspek tidak berjalan dengan baik, maka upaya pemberantasan korupsi akan menjadi kurang efektif.

Dengan demikian, menurut saya pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui perbaikan sistem, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Implikasi dari pendekatan ini adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat.

5. PENUTUP

Korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu pendekatan saja. Penegakan hukum memang memiliki peran penting dalam memberikan efek jera, tetapi upaya tersebut perlu didukung dengan langkah-langkah pencegahan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Hal ini mencakup perbaikan sistem pemerintahan, penguatan integritas kepemimpinan, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan kebijakan dan anggaran negara.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Teknologi dapat membantu meningkatkan transparansi, mempermudah pengawasan, serta meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik. Namun, menurut saya, teknologi tidak akan memberikan hasil yang maksimal tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang berintegritas serta sistem pengawasan yang kuat.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk tidak mentoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun serta berani terlibat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, proses pengawasan terhadap kebijakan publik dapat berjalan lebih efektif dan transparan.

Dengan demikian, menurut saya pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui sinergi antara kepemimpinan yang berintegritas, pemanfaatan teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat. Jika ketiga aspek ini dapat berjalan secara seimbang, maka peluang terjadinya korupsi dapat semakin dipersempit dan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat tercapai.

REFERENSI

- Asyujuti, Mohammad Fahmi, Fitria Hariani Pertiwi, Siti Lismaya Adawiyah, Erika Mulyanti, Yunia Mustika, and Aeni Latifah. 2025. "Pendekatan Integratif Dalam Pencegahan Korupsi: Studi Kasus Dan Solusi Berbasis Transparansi Dan Partisipasi Publik." *Jurnal Penelitian Inovatif* 5(1): 791–802. doi:10.54082/jupin.1229.
- Evi Apriani, Prabu Kemal Manaf, and Vivi Riska Ramadani. 2025. "Digitalisasi Sebagai Solusi Untuk Mengurangi Korupsi Di Sektor Pelayanan Publik." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3(2): 153–63. doi:10.55606/eksekusi.v3i2.1851.
- Makalao, Dwi Ajeng Maulidya, and Harry Z Soeratin. 2023. "Peran Kepemimpinan Dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi Di Era Digitalisasi 5.0 Dan Sosial Media." *Journal of Islamic Education Leadership* 3(1): 28–50. doi:10.30984/jmpi.v3i1.581.
- Rerung, T M, and E L Sobon. 2021. "Peran Teknologi Berbasis Gadget Dalam Memberantas Korupsi." ... *Kristen Indonesia Toraja*: 260–66. <http://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/PROSDING/article/download/1572/1129>.
- Steven Ferico, Elsa Putri Aryanti, and Maisya Hanifah Salsabila. 2020. "Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 1(1): 1–15. doi:10.38035/jihhp.v1i1.354.